

KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA TOHE LETEN KECAMATAN RAIHAT KABUPATEN BELU

Aldegunde Buar Mauk¹, Anita Lassa², Aplonia Pala³

¹Universitas Timor, Kefamenanu dan aldemauk1@gmail.com

² Universitas Timor, Kefamenanu dan anitalassa2@gmail.com

³ Universitas Timor, Kefamenanu dan aploniamonteiro@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Mengenai Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan serta menguraikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini dikategorikan dalam tiga model komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash yakni; (1) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*) di Desa Tohe Leten untuk menunjang terciptanya *Good Governance* tidak berjalan secara efektif. Masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam proses rapat perencanaan pembangunan Desa. (2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) usaha membangun kepercayaan yang terjadi di Desa Tohe Leten dilakukan dengan cara Pemerintah Desa memberikan laporan setiap akhir tahun. Namun meskipun demikian masyarakat tidak memberikan kepercayaan penuh kepada aparat Pemerintah lainnya. (3) Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*) Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Pemerintah melaksanakan tugasnya untuk tetap mengontrol jalannya kePemerintahan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Pemerintah tetap mempercayai masyarakat meskipun menggantikan salah satu pihak namun proses penggantian tetap diambil dari kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pada kolaborasi benar-benar dijunjung tinggi.

Kata kunci: Kolaborasi, Pemerintah, *Good Governance*.

Abstract

This study aims to describe the collaboration between the village government and the community in realizing good governance in Tohe Leten Village, Raihat District, Belu Regency. The method used in this study is a qualitative research with a descriptive approach that is to explain and describe the data obtained from the research location. The results of this study are categorized into three models of collaboration

components according to Ansell and Gash (2007), namely; (1) Face to Face Dialogue in Tohe Leten Village to support the creation of Good Governance did not run effectively. The community does not actively participate in the village development planning meeting process. (2) Building Trust (Trust Building) efforts to build trust that occur in Tohe Leten Village are carried out by means of the village government providing a report at the end of each year. However, the community does not fully trust other government officials. (3) Commitment to the collaboration process (commitment to the process) Commitment certainly has a strong relationship in the collaboration process. The government carries out its duties to maintain control over the course of government by taking actions. The government still trusts the community even though it replaces one party but the replacement process is still taken from the community. This shows that the commitment to collaboration is really upheld.

Keywords: Collaboration, Government, Good Governance.

PENDAHULUAN

Good Governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh Pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan Pemerintahan dalam suatu Negara. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* 1997, ada beberapa prinsip *good governance*, antara lain partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah Pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan.

Demi mewujudkan *good governance* maka harus dilakukan kolaborasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah Desa. Sabaruddin (2015:25) mengemukakan bahwa kolaborasi adalah kerja sama antar

organisasi, atau antar instansi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Kerja sama kolaborasi masing-masing organisasi diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap isu atau masalah tertentu yang dialami oleh masyarakat dan *stakeholder*.

Selain itu, dalam upaya mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Desa secara khusus Kepala Desa mempunyai peran besar untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kebijakan. Peranan Kepala Desa tampak nyata dalam menginisiasi kerja sama dan mendesain pola kolaborasi dalam pemerintahan desa.

Desain pemerintahan yang kolaboratif merupakan kebutuhan mutlak. Dewasa ini dunia sangat menekankan pentingnya *networking* dan kolaborasi. Jejaring dan kolaborasi dapat membantu jalannya pemerintahan yang baik, memudahkan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan efektivitas

penanganan masalah masalah di dalam masyarakat.

Urgensi pemerintahan yang kolaboratif tersebut yang belum dirasakan oleh Pemerintahan Desa Tohe Leten. Pemerintah Desa Tohe Leten masih menggunakan pendekatan yang klasik. Hal ini berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dan munculnya rasa kecurigaan terhadap pemerintahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dan rasa kecurigaan tersebut dapat menghambat rencana pembangunan desa terutama dalam upaya membangun pemerintahan yang baik yang lebih menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan adanya transparansi dalam penggunaan keuangan desa.

Problematika di atas mendasari penelitian ini. Penelitian yang fokus pada upaya pemerintahan Desa Tohe Leten untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat dengan berpijak pada model kolaborasi yang ditawarkan oleh Ansell dan Gash, yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan komitmen pada proses kolaborasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 : 3)

Sementara itu, istilah Good Governance atau pemerintahan yang baik merujuk pada hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara

negara, sektor swasta dan masyarakat. Untuk itu, dalam sektor publik dapat diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan aneka sumber daya, seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia demi kepentingan masyarakat yang menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference On Governance*, UNDP, 1999).

Good Governance memiliki sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) Tahun 1997, antara lain; partisipasi masyarakat (*participation*), tertib hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), peduli pada stakeholder/dunia usaha, berorientasi pada konsensus (*consensus*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*).

Kolaborasi

Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian

pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010), ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara.

secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan.

Tiga model komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash, sebagai berikut;

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Pada tahap dialog tatap muka para stakeholders yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2007:558). Dialog merupakan langkah awal untuk memasuki kolaborasi demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama dalam pelayanan publik di desa.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah

kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Pada umumnya rasa percaya tidak muncul seketika tetapi membutuhkan waktu. Sehingga dalam proses kolaborasi, *stakeholders* dan masyarakat perlu diyakinkan dengan perlakuan yang baik dan juga pemerintah menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengurus pemerintahan desa.

c. Komitmen Pada Proses (*Commitment On Process*)

Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan natural. Untuk mendapatkan alamiah dan keilmiah data, peneliti menggunakan metode

wawancara dan observasi langsung kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun dialog tatap muka, kepercayaan satu sama lain dan komitmen dalam menjalankan kolaborasi di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan data hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian Desa Tohe Leten mengenai kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Tohe Leten. Penulis menguraikan pembahasan ini dengan menggunakan komponen-komponen kolaborasi yang saling mempengaruhi satu sama lain menurut Ansell dan Gash (2007) yakni:

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar *stakeholders*. Dialog tatap muka berarti keterlibatan semua pihak dalam proses dialog secara langsung dan ikut berperan aktif dalam proses pembuatan setiap keputusan terkait dengan kepentingan bersama. Dalam dialog tatap muka sering terjadi perbedaan pandangan antar *stakeholders* karena masing-masing ingin memperkuat *stereotype*. Namun dialog tatap muka tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan dalam sebuah kolaborasi dan membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan

Gash (2007:551) bahwa jika beberapa *stakeholders* tidak memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumber daya untuk berpartisipasi dengan *stakeholders* yang lain maka proses *Collaborative Governance* akan rentan manipulasi oleh actor yang lebih kuat.

Berdasarkan hasil penelitian, proses kolaborasi dalam bentuk dialog tatap muka masih belum maksimal karena dalam proses pelaksanaan kegiatan di Desa Tohe Leten, Pemerintah Desa menggunakan perantara untuk menyampaikan informasi. Selain dari itu juga masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak dilibatkan secara langsung melainkan disalurkan melalui Pemerintah Desa tingkat RT. Maka dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka di Desa Tohe Leten untuk menunjang terciptanya *Good Governance* tidak berjalan secara efektif. Masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung dalam proses rapat perencanaan pembangunan Desa. Hal ini akan menimbulkan minimnya kerja sama antar Pemerintah dan masyarakat sehingga tidak tercapai suatu Pemerintahan yang baik.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Berdasarkan hasil penelitian usaha membangun kepercayaan yang terjadi di Desa Tohe Leten dilakukan dengan cara Pemerintah Desa memberikan laporan setiap akhir tahun. Namun meskipun demikian masyarakat tidak memberikan

kepercayaan penuh kepada Pemerintah sebab laporan yang ada diproduksi oleh oknum lain yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa laporan yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan laporan tersebut tidak berasal dari sumber yang dipercaya karena bukan Pemerintah namun oleh pihak ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam bentuk membangun kepercayaan di Desa Tohe Leten belum berjalan secara optimal karena Pemerintah belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*).

Maka berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Pemerintah melaksanakan tugasnya untuk tetap mengontrol jalannya pemerintahan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Keputusan mengganti orang tertentu dengan orang lain merupakan langkah yang ditemukan untuk mempertegas komitmen kolaborasi. Pemerintah tetap mempercayai masyarakat meskipun menggantikan salah satu pihak namun proses penggantian tetap diambil dari kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pada kolaborasi benar-benar dijunjung tinggi. Keputusan mengikutsertakan masyarakat merupakan bentuk kerja

sama nyata dari Pemerintah terhadap komitmen kolaborasi yang mana masing-masing aktor diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keputusan yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, komitmen pada kolaborasi di Desa Tohe Leten yang dilakukan sudah nampak meskipun hal tersebut masih menuai protes dari sebagian masyarakat di Desa Tohe Leten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu peneliti dapat menyimpulkan kolaborasi yang terjadi belum sepenuhnya berjalan efektif. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan komponen kolaborasi antara lain sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka antara pemerintah desa dan masyarakat belum maksimal, di mana terdapat masyarakat yang mengabaikan undangan pertemuan dan dialog. Selain itu, dialog yang terjadi selama ini hanya melibatkan orang-orang tertentu.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun masih rendah. Di mana masyarakat kurang mempercayai laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh masyarakat. Dalam

penyusunan laporan juga seringkali dilakukan oleh kepala desa seorang diri.

Komitmen pada proses kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tohe Leten sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan karena Pemerintah Desa maupun masyarakat menjalankan apa yang sudah disepakati bersama dan akan menerima sanksi jika lalai dalam melaksanakan tugas tersebut.

Pemerintah Desa Tohe Leten perlu memperhatikan dua saran berikut ini demi mewujudkan *good governance*, yakni;

1. Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam dialog tatap muka. Bahkan menjadwalkan secara berkala dan mengunjungi setiap RT/RW untuk berdialog dengan masyarakat.
2. Pemerintah Desa perlu membangun kepercayaan publik (masyarakat) dengan menunjukkan kinerja yang transparan dan akuntabel. Pertanggung jawaban juga bisa dibuatkan setelah sebuah program dilakukan dan melibatkan figur-figur penting di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell dan Gash, 2007. *Collaborative Governance in the theory and practice, journal of public Administration Research and Theory*. Vol; 543 571

Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebooks*, Editan 3. USA: Sage Publications. Terjemahan oleh Tjetjep Rohindi Rohidi, UI press: Jakarta

Mohamad, Nazir. 1998, *Metode Penelitian*, Salemba Empat: Jakarta

Nawawi, Hadari. 1998 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Persada; Yogyakarta

Sabaruddin, A. 2015 *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik. Graha Ilmu: Yogyakarta*
United nation development programe, 199, government of evaluation of the UNDP role in dezentralisation and local governance, working paper.

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99#:~:text=Good%20Governance%20diIndonesia%20sendiri%20mulai,Reformasi%20yang%20mutlak%20diterapkan%20dalam, diakses 29 Desember 2022, Pukul 18.00 WITA.>